

# Peningkatan Legalitas dan Akses UMKM terhadap Program Pemerintah Kota Surabaya melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Kedai Bakso Mak Kani di Kelurahan Sumber Rejo

**Habib Mustofa Helmi\*<sup>1</sup>, Sugito<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia  
\*e-mail: [22012010157@student.upnjatim.ac.id](mailto:22012010157@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [sugito.ma@upnjatim.ac.id](mailto:sugito.ma@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

*UMKM di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), meskipun hal ini sangat penting untuk mengakses berbagai program pemerintah yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Salah satu mitra yang membutuhkan pendampingan adalah Kedai Bakso Mak Kani, yang beroperasi tanpa NIB. Dalam kegiatan ini, tim MBKM Bina Desa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur melakukan pendampingan pembuatan NIB dengan tahapan identifikasi UMKM potensial, sosialisasi prosedur dan manfaat NIB, serta pendampingan teknis pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan adanya NIB, Kedai Bakso Mak Kani dapat mengakses program-program seperti pelatihan kewirausahaan, pemasaran digital, serta pinjaman modal usaha. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah peningkatan legalitas usaha yang membuka peluang untuk ekspansi usaha dan peningkatan daya saing dalam pasar yang lebih luas.*

**Kata Kunci:** NIB, Pendampingan, Program Pemerintah, UMKM, Usaha

## **Abstract**

*Many SMEs in Sumber Rejo Village, Pakal District, Surabaya City, still lack a Business Identification Number (NIB), which is crucial for accessing various government programs that can support the growth of their businesses. One of the partners requiring assistance is Kedai Bakso Mak Kani, which operates without an NIB. In this activity, the MBKM Bina Desa team from Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur provided guidance for obtaining the NIB, including identifying potential SMEs, socializing the procedures and benefits of NIB, and offering technical assistance with the registration process through the Online Single Submission (OSS) system. The results indicate that with the NIB, Kedai Bakso Mak Kani can access programs such as entrepreneurship training, digital marketing, and business capital loans. The direct impact of this activity is the improvement of the business's legality, which opens up opportunities for business expansion and enhanced competitiveness in a broader market.*

**Keywords:** Business, Government Programs, Guidance, NIB, SMEs

## **1. PENDAHULUAN**

Legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi yang memberikan akses terhadap berbagai program pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan, hingga kemitraan bisnis. Dalam perkembangannya, pelaku usaha membutuhkan izin untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka masih aktif beroperasi (Puspita & Tan, 2021). Dengan memiliki izin, pelaku usaha diharuskan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini karena ketika mereka menciptakan produk atau jasa, tanggung jawab atas produk tersebut sudah termasuk dalam perizinan. Jika terjadi kerugian bagi pihak lain, pelaku usaha harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberadaan izin dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain berfungsi sebagai legalitas utama usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha itu sendiri. Menurut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), NIB adalah langkah awal yang diperlukan agar UMKM dapat berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi formal, sekaligus meningkatkan daya saing mereka (BKPM, 2023).

Namun, kurangnya pemahaman terkait manfaat dan proses pembuatan NIB masih menjadi kendala utama bagi UMKM, terutama di wilayah Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya (2023), hanya sekitar 60% UMKM di wilayah ini yang memiliki NIB. Tanpa NIB, banyak UMKM kehilangan kesempatan untuk mengakses program-program pendukung dari pemerintah, yang dapat meningkatkan daya saing usaha mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan dukungan dan peningkatan pengetahuan tentang NIB bagi pelaku UMKM di Kota Surabaya. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya menyediakan pendamping yang secara rutin terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pembuatan NIB. Banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pelaku UMKM dengan memiliki NIB, seperti akses ke bantuan modal dan pasar. Ini menunjukkan bahwa pendamping dari Dinas Koperasi berperan sebagai fasilitator. Dukungan untuk mempermudah pendaftaran usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya termasuk mengunjungi kantor seperti Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal (DPM), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Di era digital saat ini, pendaftaran NIB semakin mudah dilakukan secara online melalui laman resmi Online Single Submission (OSS) (Furuhita et al., 2023). Selain itu, (El Fajri & Woro Astuti, 2024) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses perizinan usaha melalui sistem OSS mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat waktu penyelesaian izin, yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dengan sistem manual. Namun, masyarakat tetap perlu memahami dan mematuhi aturan serta regulasi yang berlaku.

Kedai Bakso Mak Kani, yang berdiri sejak tahun 1997, adalah salah satu UMKM potensial di Kelurahan Sumber Rejo. Dengan kapasitas produksi harian sebesar 3 kg daging yang menghasilkan sekitar 50 porsi bakso, usaha ini dikelola sepenuhnya oleh Ibu Kani sebagai pemilik. Kendati memiliki potensi yang besar, usaha ini belum terdaftar secara legal karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak UMKM kecil di Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023), bahwa hambatan utama UMKM dalam legalisasi adalah minimnya informasi dan akses pendampingan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan berbagai program untuk mendukung UMKM, termasuk Sentra Wisata Kuliner, pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Di Kecamatan Pakal, misalnya, UMKM yang memiliki NIB berkesempatan untuk berjualan di Gelora Bung Tomo selama pertandingan Persebaya Surabaya, menciptakan peluang pemasaran yang signifikan. Selain itu, kerja sama dengan Bank UMKM Jatim melalui program Kredit Pundi Kencana menawarkan pinjaman berbunga rendah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha (Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya, 2023).

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, tim MBKM Bina Desa UPN "Veteran" Jawa Timur melakukan sosialisasi secara *door-to-door* dengan pendekatan berbasis data. Berdasarkan informasi dari kantor kelurahan, dilakukan analisis terhadap UMKM potensial yang memerlukan pendampingan. Kedai Bakso Mak Kani menjadi salah satu UMKM yang dipilih untuk program ini, dengan tujuan memberikan edukasi dan asistensi teknis dalam proses pembuatan NIB. Program ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha sekaligus membuka akses ke program-program pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pendampingan ini tidak hanya memberikan solusi administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan keberhasilan program ini, Kedai Bakso Mak Kani diharapkan dapat menjadi model bagi UMKM lain di wilayah Kelurahan Sumber Rejo, mendorong terciptanya ekosistem UMKM yang legal dan berdaya saing tinggi di Kota Surabaya.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim MBKM Bina Desa dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis untuk memberikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Salah satunya adalah UMKM Kedai Bakso Mak Kani. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Identifikasi dan Analisis UMKM Potensial.  
Tim memulai dengan mengumpulkan data UMKM dari Kantor Kelurahan Sumber Rejo untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Data ini dianalisis untuk menentukan UMKM potensial berdasarkan kriteria tertentu, seperti keberlanjutan usaha, potensi pasar, dan kesiapan mengikuti program pendampingan. Tahap ini dilaksanakan pada periode 10 hingga 12 Oktober 2024.
- b. Sosialisasi dan Edukasi  
Tahap ini melibatkan kunjungan *door-to-door* ke lokasi UMKM. Tim memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat NIB, seperti akses terhadap program pemerintah, peluang pembiayaan, dan perluasan pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Sukma et al. (2024), metode sosialisasi langsung kepada pelaku usaha kecil menengah membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya legalitas usaha dalam memperluas jaringan dan peluang bisnis. Sosialisasi ini dilaksanakan antara 13 hingga 18 Oktober 2024.
- c. Pendampingan Pembuatan NIB untuk UMKM.  
Pada tahap ini, tim MBKM Bina Desa membuatkan NIB untuk UMKM terpilih. Proses ini dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelaku UMKM terkait data usaha yang diperlukan untuk pendaftaran. Setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat, tim melakukan pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Tim memastikan bahwa data yang dimasukkan benar dan lengkap, sehingga NIB dapat diterbitkan tanpa hambatan. Bimbingan dalam pengisian data OSS sangat penting untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan penundaan atau penolakan pengajuan NIB (Kurniawati, 2023). Tahapan ini berlangsung pada periode 19 hingga 30 Oktober 2024.
- d. Penyerahan NIB kepada UMKM.  
Setelah NIB berhasil diterbitkan, tim MBKM Bina Desa melakukan penyerahan NIB yang telah dicetak serta memberikan NIB berupa *soft file* kepada UMKM. Proses penyerahan NIB ini dilakukan pada 5 hingga 6 November 2024.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengumpulan Data UMKM

Proses awal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai UMKM yang ada di Kelurahan Sumber Rejo. Tim MBKM Bina Desa bekerja sama dengan Kasi Kesra Sumber Rejo untuk mendapatkan data UMKM yang mencakup berbagai informasi penting, seperti jenis usaha, lama usaha beroperasi, jumlah karyawan, produk yang dihasilkan, serta status legalitas usaha, khususnya apakah UMKM tersebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau belum. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memetakan kondisi UMKM di wilayah tersebut dan menilai sejauh mana keberadaan NIB dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Pengumpulan data yang komprehensif sangat penting dalam perancangan program pendampingan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik (Sanjatmiko, 2021). Data UMKM yang diperoleh dari Kasi Kesra tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data UMKM RW 03 Sumber Rejo

No.	Pemilik Usaha	Jenis Jasa/Produk	Status Kepemilikan NIB
1.	Sugianto	Kerupuk ikan	Sudah
2.	Supi'i	Pembuatan dan duplikat kunci	Belum
3.	Suparlin	Pentol colek	Belum
4.	Asro Riyanto	Toko kelontong	Sudah
5.	Nor Adi	Warung kopi	Belum
6.	Kani Winarti	Bakso	Belum
7.	Rita Susiani	Kue basah	Sudah
8.	Mita Aulia	Catering online	Sudah
9.	Asmat Wahyudi	Potong rambut	Belum
10.	Sulistyono	Warung makan	Sudah
11.	Panji Maulana	Jual beli ikan	Belum
12.	Dwi Rahmawati	Warung kopi	Sudah
13.	Slamet	Konveksi	Sudah
14.	Sulikah	Rujak cingur	Sudah
15.	Eny Suryani	Gorengan	Belum

### 3.2. Sosialisasi Program Pendampingan dan Analisis UMKM Potensial

Setelah data terkumpul, tim melanjutkan dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB dan bagaimana proses pembuatan NIB dilakukan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang manfaat NIB, seperti akses ke program pemerintah, bantuan modal usaha, serta peluang untuk berkembang secara lebih luas melalui pemasaran digital dan pelatihan manajerial. Tim menjelaskan bahwa memiliki NIB juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dari berbagai program pemerintah yang bertujuan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Proses sosialisasi dilakukan dengan pendekatan langsung kepada pelaku usaha, melalui pertemuan tatap muka dan diskusi informal yang memungkinkan mereka untuk bertanya langsung tentang hal-hal yang masih belum dipahami. Dalam sesi ini, tim memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang bagaimana NIB dapat meningkatkan legalitas usaha mereka. Hasil dari sosialisasi ini sangat penting, karena memberi kesempatan bagi tim untuk melihat tingkat pemahaman pelaku usaha dan menilai kesiapan mereka untuk mengikuti program pendampingan.

Dari hasil sosialisasi, tim mulai menganalisis UMKM yang menunjukkan minat dan kesiapan untuk melanjutkan ke tahap pendampingan pembuatan NIB. Beberapa kriteria yang digunakan dalam analisis ini meliputi keberlanjutan usaha, potensi pasar, serta kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti program pendampingan. Keberlanjutan usaha menjadi salah satu faktor utama, sehingga usaha yang sudah beroperasi dalam waktu yang lama dan memiliki stabilitas menjadi prioritas. Kedai Bakso Mak Kani, yang sudah berdiri sejak 1997, dipilih sebagai salah satu UMKM potensial karena telah menunjukkan keberlanjutan usaha yang signifikan. Kapasitas produksi harian yang stabil, yaitu sekitar 50 porsi bakso, serta potensi pasar yang luas di daerah tersebut menjadi alasan kuat pemilihan usaha ini.

Selain itu, kesiapan pelaku usaha juga menjadi faktor penting dalam memilih UMKM yang akan didampingi. Kedai Bakso Mak Kani, yang dikelola oleh Ibu Kani, menunjukkan sikap terbuka dan antusiasme untuk mengikuti program pendampingan pembuatan NIB. Ibu Kani memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat NIB dan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan legalitas usaha demi memperluas jangkauan pasar dan mengakses berbagai fasilitas pemerintah.

Dengan mempertimbangkan hasil sosialisasi ini, tim memilih Kedai Bakso Mak Kani sebagai UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pendampingan dalam pembuatan NIB. Proses identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh tim sangat penting dalam menentukan UMKM yang paling membutuhkan pendampingan. Sebagaimana dikemukakan oleh Zunaidi (2024), "Proses identifikasi harus didasarkan pada kriteria yang jelas agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi perkembangan usaha." Dengan demikian, Kedai Bakso Mak Kani terpilih sebagai salah satu usaha yang dapat memperoleh

manfaat langsung dari pendampingan pembuatan NIB, mengingat stabilitas dan potensi yang dimilikinya.



Gambar 1. Sosialisasi Program Pendampingan dan NIB oleh Tim MBKM Bina Desa Kepada Pelaku Usaha Kedai Bakso Mak Kani.

### 3.3. Pendampingan Pembuatan NIB.

Setelah melalui tahap identifikasi dan analisis UMKM yang memenuhi kriteria, tim MBKM Bina Desa melanjutkan ke tahapan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kedai Bakso Mak Kani. Proses pendampingan ini melibatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh tim untuk memastikan bahwa NIB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan usaha tersebut dapat segera mengakses berbagai program pemerintah yang relevan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim adalah melakukan sosialisasi kepada Ibu Kani tentang prosedur pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai pentingnya NIB bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta manfaat yang bisa diperoleh setelah NIB diterbitkan, seperti akses ke program pelatihan, pemasaran, serta bantuan keuangan dari pemerintah.

Setelah pemahaman mengenai NIB didapatkan, tim kemudian melanjutkan dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk pembuatan NIB. Data yang diminta meliputi informasi dasar mengenai usaha, seperti nama usaha, alamat, jenis usaha, serta data terkait pajak dan izin usaha yang relevan. Tim juga mengonfirmasi informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem OSS adalah akurat.

Dengan data yang lengkap, tim melanjutkan untuk mengakses sistem OSS dan mengisi formulir pendaftaran secara online. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan teliti, mengingat setiap informasi yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya agar NIB yang terbit sah dan valid. Tim MBKM Bina Desa memastikan bahwa semua tahapan pengisian dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah semua informasi dimasukkan dan diverifikasi, tim melakukan pengajuan permohonan pembuatan NIB melalui sistem OSS. Dalam waktu relatif singkat, NIB untuk Kedai Bakso Mak Kani berhasil diterbitkan dan dapat diunduh dalam bentuk soft file. NIB ini berfungsi sebagai tanda registrasi usaha yang sah, yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelatihan bisnis, akses ke pasar, dan pinjaman berbunga rendah.

Setelah NIB diterbitkan dalam bentuk digital, tim juga memastikan bahwa pemilik usaha menerima NIB dalam bentuk fisik. NIB yang sudah dicetak diberikan langsung kepada Ibu Kani sebagai pemilik usaha. Penyerahan NIB dalam bentuk fisik ini bertujuan untuk memberikan bukti sah atas legalitas usaha yang kini dimiliki oleh Kedai Bakso Mak Kani. Ibu Kani menyatakan bahwa menerima NIB dalam bentuk fisik sangat membantu dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif yang diperlukan untuk mengembangkan usaha lebih lanjut.

Dengan terbitnya NIB dan penyerahan dalam bentuk fisik serta *soft file*, Kedai Bakso Mak Kani kini memiliki dokumen yang sah secara hukum untuk mengakses berbagai fasilitas dan program yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Keberadaan NIB juga memberikan rasa aman dan legalitas yang lebih kuat bagi usaha tersebut, yang nantinya dapat membuka peluang baru dalam pengembangan usaha.



Gambar 2. Proses Pembuatan NIB Kedai Bakso Mak Kani



Gambar 3. Penyerahan NIB yang Telah Selesai Dibuat dan Dicitak

### 3.4. Dampak Pendampingan Pembuatan NIB Terhadap Akses Program Pemerintah

Salah satu manfaat utama dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah peningkatan akses UMKM terhadap berbagai program pemerintah yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha. Sebelum NIB diterbitkan, Kedai Bakso Mak Kani belum dapat mengakses program-program tersebut karena keterbatasan legalitas usaha. Namun, setelah memperoleh NIB, Kedai Bakso Mak Kani kini memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti program pelatihan, pemasaran, dan bantuan keuangan.

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi pendampingan NIB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Akses Program Pemerintah Sebelum dan Sesudah Pembuatan NIB

Jenis Program	Sebelum Pembuatan NIB	Setelah Pembuatan NIB
<b>Program Pelatihan Bisnis</b>	Tidak dapat mengakses pelatihan yang disediakan pemerintah	Dapat mengakses pelatihan bisnis dari dinas terkait
<b>Program Pemasaran Digital</b>	Tidak memiliki akses ke program pemasaran digital pemerintah	Dapat memanfaatkan program pemasaran digital dari pemerintah
<b>Akses Pinjaman Modal Usaha</b>	Tidak dapat mengajukan pinjaman modal usaha	Dapat mengajukan pinjaman modal dengan bunga rendah melalui program Bank UMKM Jatim
<b>Program Pengembangan UMKM</b>	Terbatas pada usaha lokal tanpa dukungan pemerintah	Dapat mengikuti program pengembangan UMKM yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya
<b>Akses Pasar</b>	Terbatas pada pasar lokal, tanpa jaminan perluasan pasar	Dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui program seperti Sentra Wisata Kuliner dan pemasaran digital dari pemerintah
<b>Sertifikasi dan Legalitas Usaha</b>	Usaha beroperasi tanpa legalitas resmi	Mendapatkan sertifikasi legalitas melalui NIB yang sah secara hukum

Sebelum memperoleh NIB, Kedai Bakso Mak Kani tidak dapat memanfaatkan berbagai program yang ada untuk UMKM, terutama dalam hal pelatihan, pemasaran, pembiayaan, dan perluasan pasar. Akses pasar terbatas pada jaringan lokal dan komunitas setempat. Setelah NIB diterbitkan, Ibu Kani dan tim dapat mengajukan usaha mereka untuk mengikuti berbagai program pemerintah yang dapat mendukung pengembangan usaha, termasuk program pemasaran digital dan Sentra Wisata Kuliner yang disediakan oleh Pemkot Surabaya. Akses pasar yang lebih luas ini memberikan peluang bagi Kedai Bakso Mak Kani untuk memperkenalkan produk mereka ke lebih banyak konsumen, baik di dalam maupun luar wilayah Surabaya. Selain itu, NIB memberikan legalitas yang lebih kuat, memudahkan usaha untuk beradaptasi dengan regulasi pemerintah, serta membuka peluang untuk mendapatkan bantuan finansial yang lebih mudah. Hal ini menunjukkan pentingnya NIB dalam memperluas peluang bisnis dan membantu UMKM untuk berkembang lebih baik melalui berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM, khususnya Kedai Bakso Mak Kani di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, memiliki dampak signifikan terhadap legalitas usaha dan akses UMKM terhadap berbagai program pemerintah. Melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, pendampingan, dan akhirnya penerbitan NIB, Kedai Bakso Mak Kani berhasil memperoleh status legal yang memungkinkan mereka mengakses fasilitas dan program yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelatihan bisnis, pemasaran digital, dan akses ke pinjaman modal dengan bunga rendah.

Kedai Bakso Mak Kani yang telah beroperasi sejak 1997, meskipun memiliki potensi besar, sempat terhambat dalam pengembangan usaha karena belum memiliki NIB. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim MBKM Bina Desa, pemilik usaha, Ibu Kani, mendapatkan pemahaman tentang pentingnya NIB dan manfaat yang dapat diperoleh setelah terdaftar secara legal. Program ini juga memperlihatkan bahwa tidak hanya aspek administratif yang menjadi perhatian, tetapi juga kesiapan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah.

Sebagai contoh, setelah NIB diterbitkan, Kedai Bakso Mak Kani dapat mengakses berbagai program yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan, seperti pelatihan bisnis dan pemasaran digital. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan pinjaman modal dengan bunga rendah melalui Bank UMKM Jatim, yang membuka peluang bagi mereka untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Keberhasilan dalam proses pembuatan NIB ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas usaha, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai peluang yang mendukung perkembangan usaha mereka.

Secara keseluruhan, program pendampingan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi Kedai Bakso Mak Kani, tetapi juga memberikan contoh nyata bagi UMKM lainnya di Kelurahan Sumber Rejo dan sekitarnya. Pendampingan yang berbasis data dan pendekatan yang sistematis ini menjadi kunci penting dalam mendukung UMKM untuk berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi formal dan membuka peluang baru untuk pengembangan usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2023). *Panduan Investasi dan Pengembangan UMKM*. Jakarta: BKPM.
- Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya. (2023). *Laporan Kinerja Nomenklatur Pohon Kinerja*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- El Fajri, M. R., & Woro Astuti, S. J. (2024). Efektivitas Sistem Perizinan Online Osa Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 60–71. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.227>

- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102–109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Nomor Induk Berusaha: Langkah Awal Mengintegrasikan UMKM ke Ekosistem Ekonomi Formal*. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Rencana Strategis Pengembangan UMKM Indonesia 2021-2025*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “Cimami Jagonya Snack” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Rahmadani, A. P., Agustina, D., Khuzaimah, D., Ningsih, E. C. W., Assafillia, F., Kurniawati, K. D., Imanulloh, M., Rohim, R. N., Izzati, S. Z., Nurlaeli, I., & Jannah, Z. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Dalam Digitalisasi Marketing. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 57–66. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.39>
- Sanjatmiko, P., & Hardiah, S. (2021). *Seni mengumpulkan data secara komprehensif*. NASMEDIA.
- Sukma, D. P., Wijayanto, D. C. W., Putri, F. A. W., Syamsiyah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). Sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Surakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 2019–2026. <https://www.bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/7424>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1030>